

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Gelontorkan Rp 5,4 Miliar Dana Stimulasi Untuk Petani



Sumber gambar:

https://img.antaranews.com/cache/800x533/2023/04/07/IMG_20230407_205817.jpg.webp

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui dinas ketahanan pangan dan hortikultura provinsi setempat menggelontorkan Rp5,4 miliar dana stimulasi untuk kelompok tani di tujuh kabupaten/kota.

Menurut Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Holtikultura Kalsel Syamsir Rahman di Banjarbaru, Jumat, dana perangsang bagi peningkatan produktivitas petani di tujuh kabupaten/kota ini mulai disalurkan. “Ini sebagian perhatian dan komitmen Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor untuk menguatkan ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani melalui dana stimulus,” ujarnya.

Dipaparkan dia, dana stimulasi untuk petani di tujuh kabupaten/kota tersebut, yakni, Kota Banjarbaru, Kota Banjarmasin, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Tapin, Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Kabupaten Tanah Bumbu. Pemberian dana stimulus ini bertujuan agar produktivitas hasil pangan terus meningkat di tujuh kabupaten/kota tersebut sehingga pendapatan petani pun bertambah.

Namun Syamsir mengingatkan, keberhasilan bantuan ini sangat tergantung pada peran kepala daerah yang bersangkutan dalam memonitor dan mengawasi pemanfaatan dana yang diberikan. “Jangan tidak dipantau, karena tanggung jawab ketahanan pangan itu ada di tangan bupati/wali kotanya,” ucapnya.

Apalagi, pada tahun 2022 lalu khususnya pertanian padi mendapatkan tantangan dengan adanya serangan hama tungro yang membuat tumbuhan padi menjadi kerdil. Serangan hama tungro membuat hasil panen padi pada tahun 2022 menurun drastis,

jauh dari tahun-tahun sebelumnya yang mencapai lebih 1,5 juta ton gabah kering. “Kita berharap pertanian padi tahun 2023 ini bisa berhasil, hingga daerah kita kembali swasembada beras,” paparnya.

Apalagi Kalsel bertekad menjadi penyangga pangan bagi Ibu Kota Negara (IKN) baru di Provinsi Kalimantan Timur. “Jadi ketahanan pangan kita harus kuat, perhatian terhadap petani juga terus ditingkatkan, hingga mereka bisa sejahtera,” demikian kata Syamsir.

Pada sumber yang berbeda diberitakan bahwa Gubernur Kalsel Sahbirin Noor atau Paman Birin komitmen terhadap pembangunan infrastruktur di Banua. Salah satunya adalah sudah disiapkannya perbaikan atau rehabilitasi jalan provinsi yang ada di Kabupaten Balangan pada tahun 2023 ini dengan anggaran total sebesar Rp11.547.040.000.

Besaran anggaran dan pengerjaan ini pun sekaligus membantah berbagai rumor yang menyebut rehabilitasi jalan di Kabupaten Balangan tidak diperhatikan. Ada 2 paket pekerjaan rehabilitasi ruas jalan yang telah dianggarkan melalui Dinas PUPR Provinsi Kalsel.

Yakni, paket rehabilitasi pada ruas Jalan Lampihong-Paringin dan satu lagi paket perbaikan Jalan Paringin – Halong. “Insya Allah, tahun 2023 ini proses pengerjaan bisa dilakukan. Ada 2 paket pengerjaan, Jalan Lampihong-Paringin dan Jalan Paringin-Halong,” ujar Ahmad Solhan, Kepala Dinas Perkerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pemprov Kalsel pada Kamis (6/4).

Disampaikan Solhan, untuk rehabilitasi jalan Lampihong-Paringin, Pemprov Kalsel pagu anggaran sebesar 2.773.520.000 dan saat ini sudah dalam proses kontrak yang dimenangkan oleh PT. Cahaya Sambang Sejahtera dengan kontrak sebesar 2.636.444.800.

Sedangkan untuk Jalan Paringin-Halong, APBD Pemprov telah dianggarkan dengan pagu 8.773.520.000 dan saat ini dalam persiapan lelang atau purchase e-katalog. Solhan menjelaskan, Pemprov Kalsel selalu menganggarkan dana untuk pembangunan dan pemeliharaan Jalan Provinsi di Kabupaten Balangan melalui Dinas PUPR Prov. Kalsel.

Sehingga, jelas bahwa anggapan Pemprov Kalsel tidak menganggarkan untuk pemeliharaan jalan provinsi di Kabupaten Balangan seperti yg di sampaikan oleh Bupati Balangan itu tidak mendasar.

“Setiap tahun Dinas PUPR Provinsi selalu berkoordinasi dgn Dinas PUPR Kab. Balangan dalam menyinkronkan kegiatan di dua wilayah Kab. Balangan dan Provinsi. Setiap tahun juga kawan-kawann DPRD Kabupaten Balangan juga selalu koordinasi dengan Dinas PUPR Prov. Kalsel dalam berkoordinasi kegiatan pembangunan dan

pemeliharaan jalan di Kab. Balangan. Hal ini menunjukkan antara Prov. Kalsel dan Kab. Balangan sdh sinkron dalam pengawasan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jalan prov. di Kab. Balangan,” jelasnya.

Solhan juga menyampaikan, tidak memungkiri jalan provinsi selama ini sangat membantu masyarakat khususnya Kab. Balangan termasuk menjadi lalu lintas angkutan tambang dan angkutan berat yang melintas di jalan provinsi. Tapi untuk menjaga pemeliharaan jalan tersebut, alangkah eloknya jika tidak selalu di serahkan sepenuhnya ke Pemprov Kalsel saja, namun juga Kab. Balangan dan Balai Jalan Nasional juga ada ikut andil sehingga kita bisa sama-sama menjaga dan mengawasi jalan provinsi ini.

“Sebanyak dana yang di anggarkan untuk pemeliharaan jalan provinsi, tapi tidak kita jaga dan awasi bersama sama, maka akan sangat sia-sia yang selama ini Pemprov Kalsel melakukan pemeliharaan,” terang Solhan.

Solhan mengungkapkan, sebagaimana komitmen dan arahan Paman Birin, perbaikan-perbaikan jalan provinsi di seluruh kabupaten/kota se-Kalsel menjadi perhatian. Pun begitu, untuk jalan di kabupaten/kota lain akan dilakukan secara bergantian dan bertahap.

Solhan juga menyampaikan, upaya Pemprov Kalsel dalam perbaikan jalan milik provinsi ini pun sesuai sebagaimana visi Kalimantan Selatan Maju (Makmur, Sejahtera dan Berkelanjutan) sebagai Gerbang Ibukota Negara, yang mana salah satu Misinya adalah Memperkuat sarana Prasarana Dasar dan Perekonomian.

Selain itu, apabila infrastruktur jalan baik, tentu sebagaimana Misi Kalsel Maju, nantinya akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata. “Kita berharap, upaya-upaya perbaikan ruas jalan yang dilakukan Pemprov Kalsel ini akan memudahkan akses transportasi, memudahkan pergerakan lalulintas angkutan barang kebutuhan yang ujungnya tentu untuk kesejahteraan warga Banua,” terang Solhan.

Sumber Berita

1. <https://dutatv.com/paman-birin-anggarkan-rp115-miliar-perbaiki-jalan-di-kabupaten-balangan/>, Paman Birin Anggarkan Rp11,5 Miliar Perbaiki Jalan di Kabupaten Balangan (08/04/23)
2. <https://www.antarane.ws.com/berita/3477615/pemprov-kalsel-gelontorkan-rp54-miliar-dana-stimulasi-untuk-petani>, Pemprov Kalsel gelontorkan Rp5,4 miliar dana stimulasi untuk petani (07/04/23)

Catatan:

Pengaturan Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN/APBD sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003

- 1) Pasal 31 ayat (1); Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Penjelasan dari Pasal ini menyampaikan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari Pemerintah Daerah.

- 2) Pasal 31 ayat (2); Laporan keuangan dimaksud setidaknya meliputi Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah.

Dilanjutkan dalam penjelasan Pasal tersebut bahwa Laporan Realisasi Anggaran selain menyajikan realisasi pendapatan dan belanja, juga menjelaskan prestasi kerja satuan kerja perangkat daerah.

- 3) Pasal 32 ayat (1); Bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

- 4) Pasal 32 ayat (2); Standar akuntansi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun oleh suatu komite standar yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Disampaikan lebih lanjut dalam bagian penjelasan apabila dalam waktu 2 (dua) bulan tidak memberikan pertimbangan yang diminta, Badan Pemeriksa Keuangan dianggap menyetujui sepenuhnya standar akuntansi pemerintahan yang diajukan oleh Pemerintah.